

Sistem Informasi Monitoring Pajak Bumi Bangunan menggunakan Metode *Rapid Application Development*

Fidya Arie Pratama ¹, Mulyana ², Odi Nurdiawan ^{3,*}, Rully Pramudita ⁴

¹ Komputerisasi Akuntansi; STMIK IKMI; Jl; Perjuangan No 10B Majasem Kota Cirebon (0231) 490480; e-mail: fidyaarie@gmail.com.

² Teknik Informatika; STMIK IKMI; Jl; Perjuangan No 10B Majasem Kota Cirebon (0231) 490480; e-mail: mulyana@gmail.com

³ Manajemen Informatika; STMIK IKMI; Jl; Perjuangan No 10B Majasem Kota Cirebon (0231) 490480; e-mail: odynurdiawan@gmail.com

⁴ Manajemen Informatika; Universitas Bina Insani; Jl; Raya Siliwangi No 6 Rawa Panjang Bekasi Timur (021) 82436886; e-mail: rullypramudita@gmail.com

* Korespondensi : e-mail: odynurdiawan@gmail.com

Diterima: 15 September 2019; Review: 24 September 2019; Disetujui: 30 September 2019

Cara sitasi: Pratama F A, Mulyana, Nurdiawan O, Pramudita R. 2019. Sistem Informasi Monitoring Pajak Bumi Bangunan menggunakan Metode Rapid Application Development. Bina Insani ICT Journal. 6 (2) : 135-146

Abstrak: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu pajak yang memberikan kontribusi besar bagi pendapatan daerah. Pajak tersebut dapat dibayarkan melalui Pemerintah Desa, kemudian disetorkan ke bank daerah atau instansi lain yang ditunjuk oleh pemerintah. Salah satu masalah yang dihadapi oleh pemerintah desa sendiri adalah sulitnya untuk mengetahui perkembangan pembayaran, realisasi penerimaan, pengolahan basis data wajib pajak dan capaian kinerja kolektor pajak, karna masih dilakukan dengan mekanisme manual sehingga mempengaruhi keterserapan pajak bumi dan bangunan, data pencapaian pemungutan pajak selama 4 tahun terakhir mengalami penurunan, dari tahun 2014 sampai dengan 2017 secara berurutan sebesar 49%, 51%, 48% dan 48% dengan target yang ditetapkan setiap tahun sebesar 60%. Solusi yang harus dilakukan adalah pengembangan sistem informasi monitoring pajak bumi dan bangunan yang dirancang menggunakan metode pengembangan RAD (*Rapid Application Development*) dengan tahapan *Requirement Planning*, *Workshop Design* dan *Implementation*, sehingga pengembangan sistem jadi lebih cepat dan efisien. Dari hasil perhitungan menggunakan perintah one sample t-test didapatkan t-hitung sebesar 36,263 dan T-tabel sebesar 1,699 maka hasilnya T-hitung > dari T-tabel, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan mengalami peningkatan penerimaan sebesar $\geq 60\%$ setelah menggunakan Sistem Informasi Monitoring Pajak Bumi dan Bangunan.

Kata kunci: Pajak, RAD, Sistem Informasi

Abstract: Land and building tax is one tax that makes big contribution for regional income, this tax can be paid through at village government then deposit to bank or other agencies appointed by the government. One of the problems to struggle by the village government is a difficulty to know payment progress, realization of tax receipt, tax payer database processing, and achievement of the collector's performance because it's still done with manual mechanism that affecting to absorption of land and building tax, achievement of tax collection over the 5 years has decreased from the 2014 to 2018 in a sequence of 49%, 51%, 48%, 48% and 49% with a target set every year at 60%. The solution that must be done is the development of a land and building tax monitoring information system designed using Rapid Application Development (RAD) method, with the stages of Requirement Planning, Workshop Design and Implementation, so that the development of the system becomes faster and more efficient. From the results of

calculation using one sample t-test command obtained t-count of 36,263 and T0tabel of 1,699 the result of T-count > T-table, it can be concluded that revenue from land and building tax has increased by $\geq 60\%$ after using the Land and Building tax Monitoring Information System.

Keywords: Information System, RAD, Tax

1. Pendahuluan

Desa atau kelurahan merupakan intansi dengan tingkatan paling bawah dalam tatanan pemerintahan di republik Indonesia, salah satu tugas dan kewajibannya adalah mengadakan pemungutan pajak bumi dan bangunan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 1994 dan diperbaharui dengan Undang- Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa PBB sektor perdesaan dan perkotaan dialihkan menjadi pajak daerah, kemudian diperkuat oleh Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.07/2010 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah. Pembayaran pajak bumi dan bangunan di kabupaten Cirebon dilakukan melalui desa yang membentuk tim pemungutan pajak (kolektor pajak) yang kemudian pembayaran dilakukan melalui bank daerah yang ditunjuk oleh Dinas Pendapatan Daerah [Handayanto et al., 2017]. Namun dalam pelaksanaannya selam bertahun-tahun, Pemerintah daerah kabupaten Cirebon dan khususnya pemerintah desa mengalami satu kendala besar dalam teknis pemungutan pajak kepada masyarakat, setiap tahun pemerintah desa menunggak pembayaran pajak, target 60% setoran jarang sekali tercapai, khususnya pemerintah desa mengalami kesulitan dalam memenuhi target 60% setiap tahunnya [Sufiyanti, 2007].

Pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan daerah menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) beserta Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) yang didistribusikan melalui Kecamatan dan kemudian dibagikan ke setiap desa untuk dilaksanakan pemungutan. Namun mekanisme detail pemungutan pajak bumi dan bangunan tidak diatur dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2009 sehingga masing-masing pemerintah daerah memiliki tata cara yang berbeda dalam mensiasati kekosongan hukum tersebut melalui rancangan peraturan daerah (Raperda) [Yuliarta et al., 2015].

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Riza Utiahman pada tahun 2016 tentang Analisis Efektivitas & Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) Kota Tomohon menggunakan metode studi kasus, dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Pajak PBB-P2 dikota Tomohon masih kurang efektif, setiap tahun persentasinya fluktuatif [Utiahman et al., 2016]. Hal tersebut juga dialami oleh Pemerintah daerah Kabupaten Cirebon, khususnya pemerintah desa sebagai salah satu instansi yang ditugaskan untuk menggelar pemungutan pajak [Irwani Yulistiawana, Nur Aeni Hidayahb, 2012; Meilina, 2010].

Berdasarkan pengamatan penulis database SPPT atau wajib pajak diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah sudah memiliki sistem informasi dalam pengolahannya, namun belum sebuah aplikasi untuk mengolah hasil pemungutan pajak untuk tingkat pemerintah desa yang pada kenyataannya berinteraksi secara langsung dengan wajib pajak. Kebutuhan pemerintah desa akan sebuah sistem informasi meliputi pengolahan data pajak, penghitungan hasil pajak yang akurat, laporan pembayaran dan progres pemungutan pajak yang berkala [Hidayat and Ramdanis, 2018]. Berikut data pencapaian pemungutan pajak desa Klangeran dalam 4 tahun terakhir :

Tabel 1 Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan

No.	Tahun	Beban Pajak	Pencapaian	Persentase
1	2015	Rp. 89.000.450	Rp. 43.450.100	49 %
2	2016	Rp. 88.900.125	Rp. 45.700.200	51 %
3	2017	Rp. 89.000.450	Rp. 42.875.000	48 %
4	2018	Rp. 89.000.450	Rp. 43.860.	48 %

Sumber : Pemerintah Desa Klangeran Kabupaten Cirebon (2019)

Dari data tabel 1 dapat diketahui bahwa pencapaian target penerimaan pajak mengalami naik dan turun, jika dibebankan oleh target 60% yang dicanangkan pemerintah daerah, maka perolehan tersebut tidak memenuhi target yang ditentukan.

Pemerintah Desa mengalami kendala dalam proses pengolahan data wajib pajak, jika diuraikan proses mengolah data wajib pajak dimulai dari pembentukan tim pemungutan pajak yang terdiri dari kordinator pajak (ketua) dan para kolektor yang biasanya diangkat dari perangkat desa, pemerintah desa menerima salinan Data Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) yang berupa file Microsoft excel dari kecamatan beserta lembaran SPPT, kemudian kordinator pajak membagi setiap kolektor data wajib pajak yang harus ditagih, secara berkala mereka menyetor hasil penagihan ke kordinator pajak, dan terakhir disetorkan ke bank daerah yang sudah ditunjuk, dalam prosesnya seringkali terjadi salah penyetoran, mulai dari salah data, salah nominal, SPPT tertukar, dan nominal uang yang tersetor tidak sesuai dengan hasil penagihan [Badan Pusat Statistik, 2018; Israel, 2012].

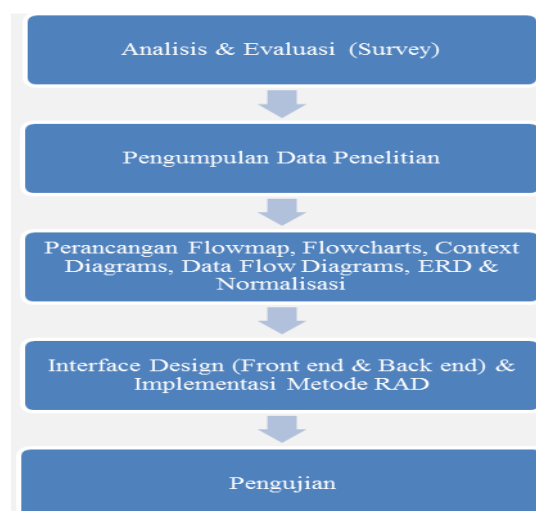
Hal diatas dialami oleh pemerintah desa selama bertahun-tahun, karena belum adanya aplikasi atau sistem informasi untuk mengolah data pemungutan pajak, sehingga kolektor maupun kordinator kesulitan mengorganisir atau memantau hasil yang sudah tercapai, karena selama ini data yang mereka olah berupa catatan-catatan yang dari tahun ke tahun selalu dipakai tanpa diupdate, sedangkan data wajib pajak selalu bertambah atau berubah nilai objek pajaknya [Inman, 2010; Lesmana et al., 2015].

Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Menganalisis kebutuhan sistem monitoring pajak bumi dan bangunan, 2) Merancang sistem informasi monitoring pajak bumi dan bangunan meliputi desain antar-muka dan bisnis prosesnya, 3) Membangun sistem informasi monitoring pajak bumi dan bangunan sesuai rancangan dan analisis sebelumnya. Menguji sistem informasi monitoring pajak bumi dan bangunan dan mengevaluasi sesuai ketentuan yang diharapkan

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis survey, yang dilakukan dengan menggunakan angket / kuisioner untuk mengumpulkan data pada topik atau isu tertentu [Sugiyono, 2017]. Sifat penelitian ini adalah studi kausalitas yang mengukur hasil/kekuatan antara dua variabel atau lebih. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, pendekatan kuantitatif adalah penelitian yang memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan [Whitten, 2006].

Alur penelitian menjelaskan langkah-langkah dalam pengembangan system informasi monitoring pajak bumi dan bangunan dalam rangka mengetahui tingkat keterserapannya, dimulai dengan analisis dan survey, pengumpulan data, perancangan, penerapan metode *Rapid Application Development* (RAD), pengujian hingga kesimpulan [Amos Neolaka, 2014]. Berikut diagram alur dalam penelitian ini :



Sumber : Hasil Penelitian (2019)

Gambar 1. Alur Penelitian

Dalam tahap analisa dan evaluasi dilakukan dengan survey lapangan didesa Klungenan untuk menggali dan mengamati proses pemungutan pajak yang dilakukan oleh petugas kolektor pajak dan pengelolaan data pasca pemungutan pajak, dan laporan yang

dibuat ketika setor, penulis melakukan wawancara terhadap petugas kolektor pajak dan kordinator pajak. Pada tahapan analisis dan evaluasi peneliti setidaknya melakukan 3 tahapan, yaitu : 1) Observasi, 2) Wawancara, 3) Studi Pustaka

Proses pengumpulan data pendukung penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data internal yang berupa buku induk wajib pajak, format laporan, buku regulasi yang berkaitan & buku prosedur tata cara pemungutan pajak dan data eksternal dari penelitian yang berkaitan seperti jurnal dan buku.

Tahap penerapan metode *Rapid Application Development (RAD)* bertujuan untuk membangun sistem informasi dengan waktu yang singkat mengingat kebutuhan akan sistem informasi bersifat penting, metode tersebut dibagi menjadi tiga tahap yaitu *Requirement Planning*. Tahap ini merupakan tahap dimana kita menggali dan mengidentifikasi tujuan yang akan dicapai dalam aplikasi. Hasilnya adalah menghasilkan sistem informasi monitoring pemungutan pajak bumi dan bangunan, menyediakan akses pengelolaan data pajak yang lebih mudah dan dan terukur secara berkala, mengetahui tingkat keterserapan pajak bumi dan bangunan, menyajikan laporan pemungutan pajak dengan cepat. *Workshop Design*, pada tahap ini ditentukan proses-proses yang dibutuhkan dalam aplikasi seperti perancangan basis data, perancangan proses alur aplikasi (DFD, ERD, Flowchart dan Flowmap), serta perancangan tampilan antar-muka (interface). *Implementation*, tahap implementasi merupakan tahap pengujian aplikasi yang sudah dirancang sebelumnya, setiap menu dan fungsi proses diujikan oleh pengguna, apakah sesuai yang diharapkan atau tidak. Nantinya hasil tersebut menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan sesuai perancangan.

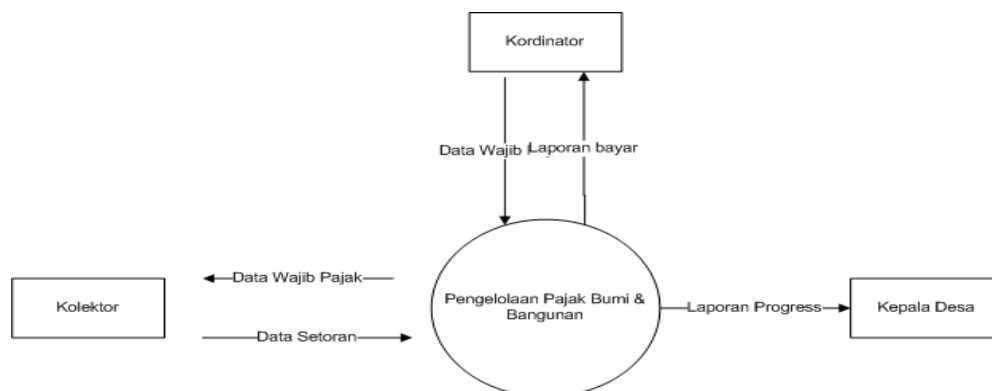
Proses pengujiannya ini dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian tujuan awal dalam pembuatannya. Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan dari mekanisme sebelumnya, menggunakan validitas data berdasarkan angket dan kuisisioner

3. Hasil dan Pembahasan

Tahap *Requirement Planning* (Perencanaan Kebutuhan)

Sistem yang sedang berjalan untuk menangani manajemen pengelolaan pajak bumi dan bangunan menggunakan prosedur yang sudah ditentukan sebelumnya. Setiap tahun pemerintah desa menerima DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) dan SPPT (Surat pemberitahuan Pajak Terhutang) yang disalurkan oleh Dinas Pendapatan Daerah melalui kecamatan. Setelah DHKP dan SPPT diterima pemerintah desa membuat tim pemungutan yang terdiri atas Kordinator dan beberapa kolektor, setiap kolektor dibebankan data SPPT wajib pajak yang harus ditagih, setelah melakukan penagihan ke wajib pajak, kolektor kemudian menyetor hasil pemungutan kepada kordinator, kegiatan ini dialukan dengan berkala setiap minggu, setelah itu kordinator merekap setiap setoran dan disetorkan ke bank. Berikut analisis proses system yang sedang berjalan :

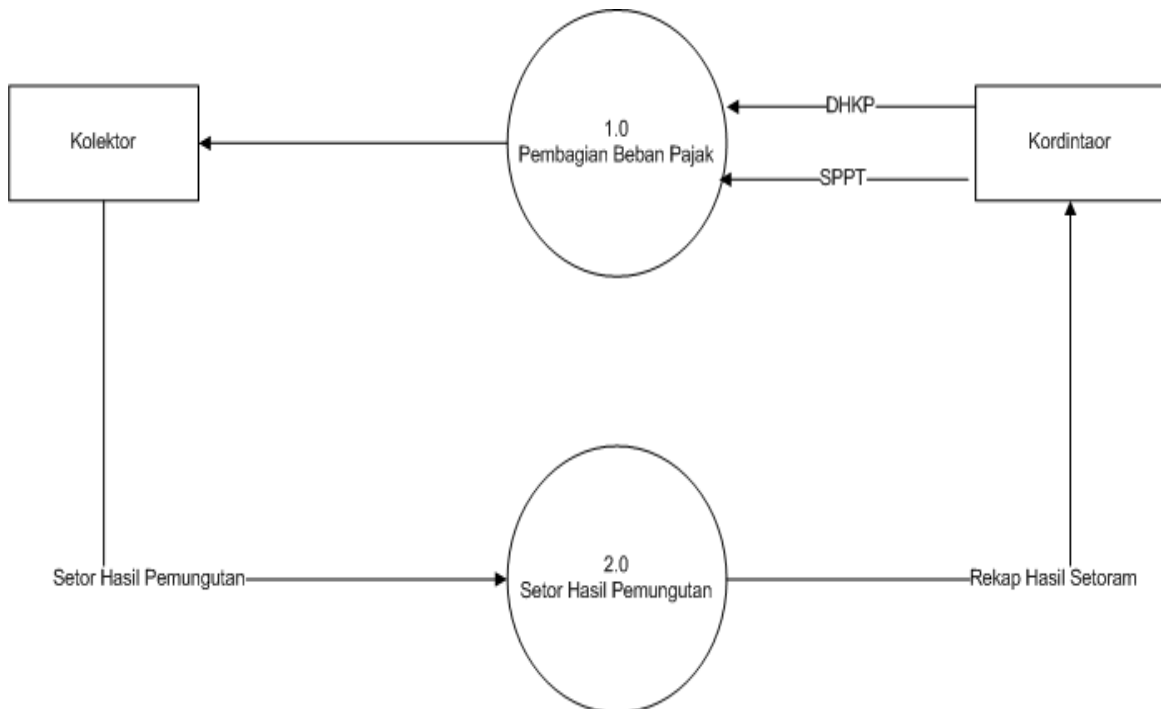
Diagram Konteks. Pada gambar 2 menggambarkan alur proses pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan banguna yang selama ini berjalan di Desa Klungenan Kecamatan Klungenan Kabupaten Cirebon, entitas yang terlibat antara lain kolektor, kordinator dan kepala desa, seluruh petugas merupakan perangkat desa dan bias juga diluar struktural desa.



Sumber : Hasil Penelitian (2019)

Gambar 2. Diagram Konteks Sistem Yang Berjalan

DFD (*Data Flow Diagram*), gambar 3 merupakan *Data Flow Diagram (DFD)* dari proses pemungutan pajak bumi dan bangunan.

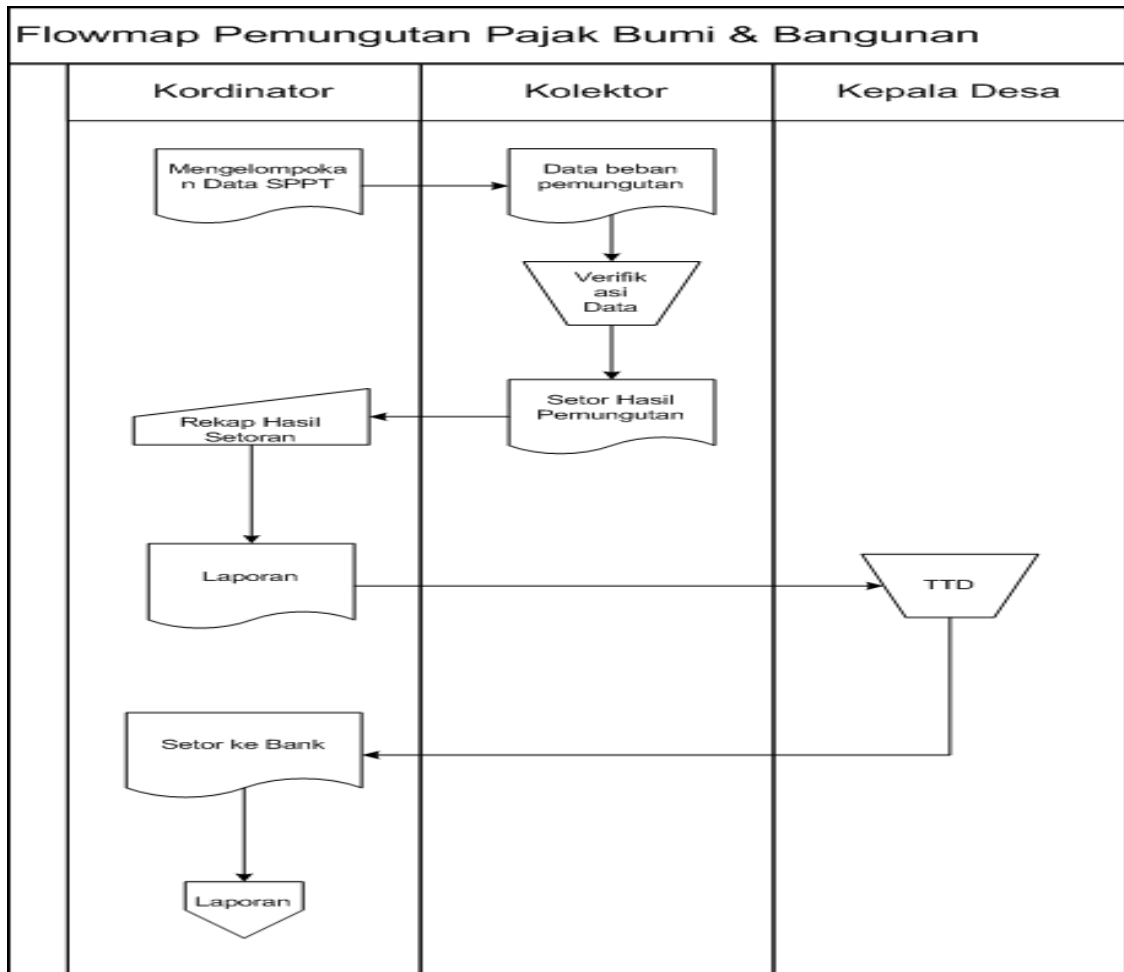


Sumber : Hasil Penelitian (2019)

Gambar 3. DFD Level 0 Sistem Berjalan

Berdasarkan Gambar 3 menjelaskan bahwa proses DFD Level 0 Sistem Berjalan memiliki dua sub entitas atau proses yaitu 1.0 Proses Pembagian Beban Pajak dan 2.0 Sektor Hasil Pemungutan. Serta memiliki dua aktor yang berhubungan dengan sistem ini yakni kolektor dan kordinator.

Selain DFD, langkah selanjutnya yaitu menggambarkan aliran dokumen yang ada pada sistem pajak bumi dan bangunan yang sedang berlangsung saat ini. Agar lebih mudah untuk memahami aliran dokumen tersebut maka akan dibuatkan dalam bentuk diagram *flowmap*. *Flowmap* yang sedang berjalan tergambar pada gambar 4. Berdasarkan gambar 4 tersebut, maka dapat disimpulkan kelemahan sistem yang sedang berjalan adalah pengelolaan data wajib pajak belum menggunakan sistem yang terstruktur, pembagian beban wajib pajak menggunakan aplikasi Microsoft excel, dan rentan tidak sesuai nominal, data beban tagihan kolektor rentan tertukar, laporan untuk setor ke bank tidak praktis dan rentan jumlahnya tidak sesuai nominal dan jumlahnya, data realisasi pemungutan sulit untuk didapatkan, serta progress tiap kolektor sulit untuk diukur.



Sumber : Hasil Penelitian (2019)

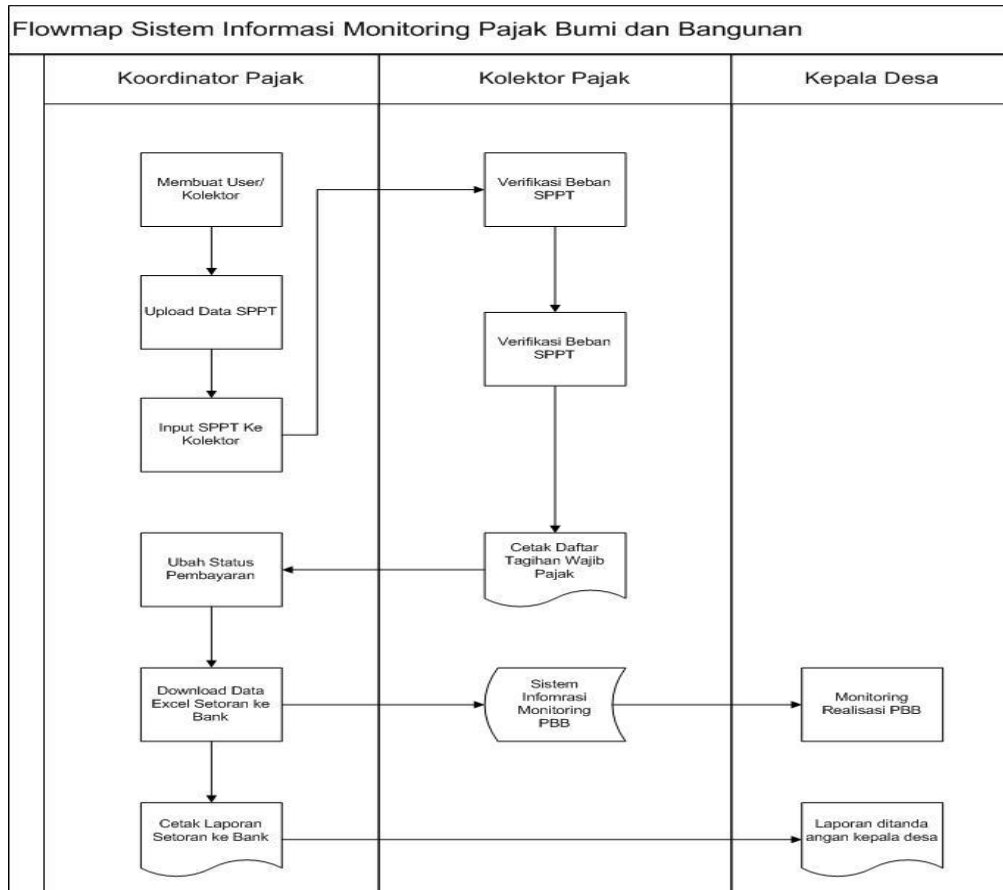
Gambar 4. Flowmap Sistem Berjalan

Solusi Pemecahan Masalah

Pemecahan masalah yang dikembangkan dalam menyelesaikan masalah adalah dengan pengembangan sistem informasi untuk memonitoring pajak bumi dan bangunan yang dapat mengakomodir kebutuhan dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan dari mulai distribusi data SPPT, pengelolaan hasil setoran dan laporan, sehingga proses panjang tersebut dapat dipantau prosesnya.

Analisis Sistem Usulan

Dengan adanya sistem informasi monitoring pajak bumi dan bangunan memudahkan petugas pemungutan pajak untuk mengelola dan memantau pemungutan pajak bumi dan bangunan. Untuk lebih jelasnya usulan sistem baru akan digambarkan dalam bentuk flowmap, berikut pada gambar 5 adalah usulan sistem baru :



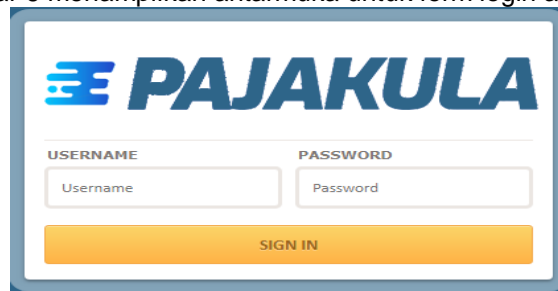
Sumber : Hasil Penelitian (2019)

Gambar 5. Flowmap Sistem Usulan

Hasil Perancangan Sistem

Form Login

Berikut pada gambar 6 menampilkan antarmuka untuk form login aplikasi.



Sumber : Hasil Penelitian (2019)

Gambar 6. Tampilan Form Login

Progress

Berikut pada gambar 7 menampilkan antarmuka untuk progres pengumpulan pajak.

NO	KOLEKTOR	SPPT	TAGHAN	BELUM LUNAS (Lbr)	BELUM LUNAS (Rp.)	LUNAS (Lbr)	LUNAS (Rp.)	PROGRESS LUNAS	LUNAS TERSEKUT (Lbr)	LUNAS TERSEKUT (Rp.)	PROGRESS LUNAS TERSEKUT
1	ADI NURYADI	75	1.636.129	1	55.208	0	0	0 %	74	1.580.921	96.63 %
2	ARIS SUSANTO	210	11.675.934	0	0	0	0	0 %	210	11.675.934	100 %
3	EFENDI	116	10.481.673	20	2.797.966	1	445.342	4.25 %	95	7.238.365	69.06 %
4	FIRMAN FATHURROHMAN	145	5.427.734	58	1.851.557	0	0	0 %	87	3.576.177	65.89 %
5	HERI SUPRIYADI	249	11.040.865	155	7.576.249	2	110.970	1.01 %	92	3.353.646	30.37 %
6	IWAN SUKRAJAT BUSLAN	138	11.658.392	135	11.033.393	0	0	0 %	3	624.999	5.36 %
7	MAHRUS	178	9.602.927	57	3.338.356	1	14.000	0.15 %	120	6.250.571	65.09 %
8	HQHMAHAD SOLIKIN	170	3.926.927	14	383.044	0	0	0 %	156	3.543.883	90.25 %
9	MUHDIN	123	6.121.201	28	1.643.057	0	0	0 %	95	4.478.144	73.16 %
10	SUSANTO	171	9.180.748	33	3.137.168	0	0	0 %	138	6.043.580	65.83 %
11	UJANTO HANSYAH ARNOTO	140	12.787.950	17	2.461.467	0	0	0 %	123	10.126.483	79.19 %
12	UYAT	155	3.253.054	3	45.804	0	0	0 %	152	3.207.250	98.59 %
JUMLAH TERSEKUT:		1870	96.793.534	521	34.523.269	4	570.312	0.59 %	1345	61.699.953	63.74 %
JUMLAH TOTAL SPPT 2019 :		1871	96.807.534	-	-	-	-	-	-	-	-
PERSENTASE		99.95 %	99.99 %	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Hasil Penelitian (2019)

Gambar 7. Tampilan Progres Pengumpulan Pajak

Tampilan Kolektor

Berikut pada gambar 8 menampilkan antarmuka untuk menu kolektor pajak.

SPPT TOTAL 2019 : 1871 Lembar Rp. 96.807.534

NAMA KOLEKTOR : ADI NURYADI

SPPT TAGHAN : 75 Lembar Rp. 1.636.129 - 1.69 % *

BELUM BAYAR : 1 Lembar Rp. 55.208 - 3.37 % **

LUNAS : 0 Lembar Rp. 0 - 0 % **

LUNAS TERSEKUT : 74 Lembar Rp. 1.580.921 - 96.63 % **

*: Dari Total SPPT 2019 **: Dari Tagihan SPPT Kolektor

NO	NOP	NAMA WAJIB PAJAK	NOMINAL	STATUS	KOLEKTOR
1	321116000200601290	SUAD	14.000	Lunas	ADI NURYADI
2	321116000200601300	ENI	14.665	Lunas	ADI NURYADI
3	321116000200601310	WIBOWO	23.829	Lunas	ADI NURYADI
4	321116000200601320	ANWAR	14.000	Lunas	ADI NURYADI
5	321116000200601330	SOLEH ARIFIN	17.392	Lunas	ADI NURYADI
6	321116000200601340	INA	17.804	Lunas	ADI NURYADI
7	321116000200601350	MOH HASAN	17.804	Lunas	ADI NURYADI
8	321116000200601360	TATI HARTATI	19.966	Lunas	ADI NURYADI
9	321116000200601370	DEDI	14.000	Lunas	ADI NURYADI
10	321116000200601380	EMAN SUHERMAN	68.349	Lunas	ADI NURYADI

Sumber : Hasil Penelitian (2019)

Gambar 8. Tampilan Kolektor Pajak

Upload SPPT

Berikut pada gambar 9 menampilkan antarmuka untuk menu upload SPPT.

Pertanahan / Ambil Data SPPT

SALIN DARI TAHUN SEBELUMNYA

SALIN DARI TAHUN :

KE TAHUN :

SALIN SPPT

IMPORT DATA (PASTIKAN FILE BERFORMAT .XLS/.XLSX)

TAHUN :

Browse DHPK File ...

IMPORT FILE

Sumber : Hasil Penelitian (2019)

Gambar 9. Tampilan Upload SPPT

Tambah SPPT Manual

Berikut pada gambar 10 menampilkan antarmuka untuk menu tambah SPPT.

Sumber : Hasil Penelitian (2019)

Gambar 10. Tampilan Tambah SPPT Manual

Tambah Wajib Pajak

Berikut pada gambar 11 menampilkan antarmuka untuk menu tambah pajak.

Sumber : Hasil Penelitian (2019)

Gambar 11. Tampilan Tambah Pajak

Loket Bayar

Berikut pada gambar 12 menampilkan antarmuka untuk menu loket bayar.

Sumber : Hasil Penelitian (2019)

Gambar 12. Tampilan Loket Bayar

Detail bayar

Berikut pada gambar 13 menampilkan antarmuka untuk menu detail bayar.

NO	NOP	NAMA WAJIB PAJAK	TAHUN	KOLEKTOR	TERHUTANG	KETERANGAN
1	321116000200900130	H ABDUL HOLIK / DILER YAMHA	2019	EFENDI	Rp. 445.342	Return Lunas BAYAR TAGIHAN
2	321116000200900130	H ABDUL HOLIK / DILER YAMHA	2018	EFENDI	Rp. 407.405	CETAK BUKTI BAYAR LUNAS : (01-11-2018 / 09:52 WIB) Oleh : Adi Nuryadi
3	321116000200900130	H ABDUL HOLIK / DILER YAMHA	2017	EFENDI	Rp. 443.405	CETAK BUKTI BAYAR LUNAS : (20-09-2017 / 10:53 WIB) Oleh : Firman Fathurohman

Sumber : Hasil Penelitian (2019)

Gambar 13. Tampilan Detail Bayar

Populasi penelitian berjumlah 30 orang tersebar di 5 desa. Masing-masing desa dipilih 6 orang petugas pemungutan pajak untuk dijadikan populasi. Sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasinya. Karena penelitian ini tidak lebih besar dari 100 orang responden, maka penulis mengambil 100% jumlah populasi yang ada dimasing-masing desa yaitu sebanyak 30 responden. Dengan demikian penarikan seluruh populasi untuk digunakan menjadi sampel disebut sebagai sampel sensus.

Berikut hasil analisis uji normalitas menggunakan dua metode Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk :

Tabel 2. Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Total	.803	30	.200	.953	30	.205

Sumber : Hasil Penelitian (2019)

Berdasarkan hasil output SPSS didapatkan nilai sig. Komogorov-Smirnov sebesar 0,803 dan nilai sig. pada pengujian Shapiro-Wilk sebesar 0,205. Karena jumlah sampel dibawah 50 (<50) maka penulis menggunakan nilai hasil pengujian dari Shapiro-Wilk[Dahlan, 2013] dengan besaran nilai 0,205. Jika data penelitian pada uji normalitas lebih besar dari 0.05, maka data pnelitian tersebut dapat dikatakan normal.

Uji hipotesa dilakukan menggunakan SPSS dengan perintah *One Sample T-Test*. Dalam uji hipotesa ini penulis menguji dua data penelitian, yaitu hasil angket sebelum adanya implementasi sistem dan sesudah implementasi.

Tabel 3. Statistic Deskriptive

N	Mean	Std. Deviation	Std. error Mean
Skor Sebelum	30	50.40	19.306
Skor Sesudah	30	87.47	12.202

Sumber : Hasil Penelitian (2019)

Pada perhitungan one sample statistis data total dari kedua hasil angket masing-masing menghasilkan nilai mean atau rata-rata sebesar 50.40 dan 87.47. Adapun hasil uji Hipotesa sebagai berikut :

Tabel 4. One Sampel Test

95 % Confidence Interval of the Difference						
	t	df	Sig.(2- tailed)	Mean Difference	Lower	Upper
Skor	14.299	29	.000	50.400	43.19	57.61

Sebelum						
Skor	39.263	29	.000	87.647	82.91	92.02
Sesudah						

Sumber : Hasil Penelitian (2019)

Berdasarkan table 4, hasil pengujian one sample test didapatkan hasilnya t-hitung sebesar 14.299 dan 39.263. dengan derajat frekuensi (df) sebesar 29. Kriteria pengujian hipotesa adalah sebagai berikut :

Nilai signifikan $< \alpha$, Maka H_0 ditolak, dengan α (taraf signifikan) = 0,05.

Nilai signifikasi $> \alpha$, Maka H_0 ditolak, dengan α (saraf signifikasi)= 0,05.

Berdasarkan output hasil uji hipotesa SPSS v25 dapat dinyatakan bahwa Pengembangan Sistem Informasi Monitoring Menggunakan Metode Rapid Application Development Untuk Mengetahui Keterserapan Pajak Bumi dan Bangunan dapat mempermudah pengelolaan pajak bumi dan bangunan.

4. Kesimpulan

Sistem Informasi Monitoring Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dikembangkan diharapkan mampu menyelesaikan kendala dan permasalahan dalam penyelenggaraan pemungutan pajak di desa Klenganan. Memperbaiki sistem sebelumnya yang masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan dalam mengelola wajib pajak dengan sistem yang sudah terintegrasi. Dengan diterapkannya sistem baru ini diharapkan dapat mempercepat progress pemungutan pajak bumi dan bangunan, data wajib pajak sudah tidak tertukar lagi antar kolektor dan kepala desa dapat mengetahui progress pencapaian pemungutan dengan data yang akurat dan terukur, sehingga dapat ditekan kesalahan yang sedikit mungkin yang berasal dari kekurangan sistem sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : 1) Berdasarkan hasil analisis proses pemungutan pajak bumi dan bangunan menggunakan sistem yang berjalan (sebelumnya) memerlukan waktu yang lama, karena data disetor dan direkap menggunakan input manual dan tidak terintegrasi, sehingga progress pencapaian tidak dapat dipantau dengan cepat, untuk itu dibutuhkan sistem baru untuk mempercepat proses tersebut. 2) Pengembangan Sistem Informasi Monitoring Pajak Bumi dan Bangunan dirancang untuk memudahkan kolektor, kordinator, kepala desa dan khususnya Pemerintah desa untuk mengelola hasil pemungutan pajak, khususnya kepala desa dapat memantau progres pemungutan pajak bumi dan bangunan. 3) Hasil pengembangan Sistem Informasi Monitoring Pajak Bumi dan Bangunan dapat memudahkan pekerjaan pengelolaan pajak bumi dan bangunan.

Referensi

- Amos Neolaka. 2014. Metode Penelitian dan Statistik. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Badan Pusat Statistik. 2018. Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Desember 2018. 03220.1818 2087-930X: 273.
- Dahlan MS. 2013. Besar Sampel dan Cara Pengambilan Sampel dalam Penelitian Kedokteran dan Kesehatan (ed.3). Salemba Medika.
- Handayanto RT, Tripathi NK, Kim SM, Guha S. 2017. Achieving a Sustainable Urban Form through Land Use Optimisation : Insights from Bekasi City ' s. Sustain. 2017, 9.
- Hidayat CR, Ramdanis D. 2018. Sistem Informasi Pengolahan Data Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Sisfotenika 6: 81-90.
- Inman J. 2010. Changes bring risk of losing track of information. Libr. Inf. Updat.: 25.
- Irwan Yulistiawana, Nur Aeni Hidayahb ZA. 2012. Rancang Bangun Sistem Informasi

Penggajian Karyawan (Studi Kasus: Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah). *Stud. Inform. J. Sist. Inf.* 4: 1–8.

Israel EH. 2012. Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Skpd Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kepulauan Sangihe). *Ranc. Bangun Sist. Inf. Pengelolaan Keuang. Drh. (Studi Kasus Pada SKPD Dinas Energi Dan Sumber Daya Miner. Kabupaten Kepul. Sangihe)*: 63.

Lesmana EI, Yunizar F, Informasi JS. 2015. Balai Lelang Astria Palembang. *Sist. Inf. Lelang Online Kendaraan Salvage Berbas. Web Dengan Fitur SMS Gatew. Pada Balai Lelang Astria Palembang Edwin*: 1–8.

Meilina MS. 2010. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern terhadap Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas.

Sufiyanti A. 2007. Pengaruh Efektivitas Pengendalian Intern Kas terhadap Likuiditas pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. In: *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 26e. Bandung: Alfabeta, p 5.

Utiahman NR, Walewangko EN, Siwu HFD. 2016. Analisis

Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tomohon. *J. Berk. Ilm. Efisiensi* 16: 267–277.

Whitten JL. 2006. *Metode Desain & Analisis Sistem*. Andi Offset.

Yuliarta IGA, Wairocana IGN, Sudiarta IK. 2015. Pengaturan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kota Denpasar. *Kertha Wicara* 01: 1–7.